



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan Umum APBD Aceh Utara Tahun 2011 disusun sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), penyusunan RAPBK, dan kebijakan operasional tahunan yang merupakan penjabaran RPJM Kabupaten Aceh Utara 2007-2012 pada tahun V (kelima) kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kewajiban ini merupakan tuntutan regulasi yang dipertegas melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berikutnya dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dipertegas kembali pada regulasi turunannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat RAPBK Aceh Utara akan disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*outcomes*) atau anggaran berbasis kinerja, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD ini disusun dengan berpedoman pada berbagai dokumen rencana pembangunan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Memasuki tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2007-2012, Kabupaten Aceh Utara menjabarkan dan menyusun agenda pembangunannya dengan merujuk pada capaian tahun 2009 dan kebutuhan tahun kelima dalam RPJMD ke dalam sebuah formulasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2011 dengan memanfaatkan beberapa sumber pendanaan dari APBN, APBA dan APBD serta sumber pendanaan lainnya.

Kebijakan penganggaran bagi pembangunan tahun 2011 berikutnya merupakan implikasi dari RKPD yang telah disusun khususnya sumber pendanaan APBD tahun 2011 yang berikutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara (RAPBK) Tahun Anggaran 2011.



Sistematika penjabaran Kebijakan Umum APBK ini memuat kerangka ekonomi makro daerah dengan target capaiannya serta implikasi dari asumsi dasar penganggaran yang mendasarinya serta target capaian kinerja secara terukur dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah. Substansi penting lainnya juga memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kebijakan umum ini disampaikan kepala daerah kepada DPRK untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK tahun anggaran 2011. Hasil pembahasan tersebut berikutnya disepakati sebagai sebuah hasil kesepakatan dari rancangan Kebijakan Umum APBK yang ditetapkan dalam suatu Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya KU-APBK adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011.

## **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007-2012;



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah**

Keberhasilan pembangunan daerah tercermin dari keterpaduan dan penggabungan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Tujuan pembangunan daerah harus menempatkan manusia sebagai sasaran akhir dan fokus utama dari seluruh kegiatan pembangunan, melalui pemberian pelayanan dalam berbagai segi kehidupan yaitu kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Dengan konsep pembangunan ini keberhasilan pembangunan bukan semata-mata dilihat dari perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi, melainkan kemampuan pemerintah daerah untuk menciptakan atau memungkinkan warga menikmati hidup dengan layak, mendapatkan kesehatan dan meningkatkan kreativitas hidup. Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang terindikasi kenaikan pendapatan perkapita penduduk di satu sisi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan di sisi lain.

Pencapaian stabilitas perekonomian melalui indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor produksi (sektor riil), kebijakan moneter dan inflasi, serta situasi dan kondisi umum serta pengaruh global. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan pendapatan perkapita penduduk di daerah tersebut yang diwakili oleh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengukuran PDRB tersebut dapat menunjukkan kemampuan peningkatan output yang lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang perlu diamati perkembangannya dalam hal ini adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

#### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).**

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara atas harga konstan tanpa migas pada tahun 2009 sebesar 3,67 persen, naik sebesar 0,04 persen dari tahun 2008 yang tercatat sebesar 3,63 persen. Namun pertumbuhan



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas pada tahun 2009 sebesar minus 6,35 persen, dan tahun 2008 sebesar minus 7,73 persen atau mengalami kenaikan sebesar 1,38 persen.

Penurunan produk domestik regional bruto yang dicapai sekarang ini akibat menurunnya pertumbuhan pada hampir semua sektor pendukung yang meliputi pertanian, industri pengolahan, bangunan/konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang mengalami kenaikan hanya pertambangan dan penggalian, air minum dan listrik serta jasa-jasa yang disebabkan oleh percepatan pembangunan infrastruktur.

Tingkat pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Aceh Utara dapat diketahui pada nilai yang tercermin dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2009 besaran PDRB dengan minyak dan gas menurut harga berlaku di Kabupaten Aceh Utara secara agregat adalah sebesar Rp.12.001.239.880.000,- yang menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya Rp. 11.743.494.560.000,- sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 257.745.320.000,-. Adapun besaran PDRB tanpa minyak dan gas menurut harga berlaku pada tahun 2009 di Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar Rp. 4.955.942.380.000,- yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya sebesar Rp. 4.535.626.150.000,- sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 420.316.230.000,-.

Secara rinci perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku selama 2 tahun terakhir dapat disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1  
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2009

Tahun	PDRB Migas	Pertumbuhan (%)	PDRB Non Migas	Pertumbuhan (%)
2007	11.626.295.960.000,-	-1,77	4.238.142.390.000,-	12,14
2008	11.743.494.560.000,-	1,01	4.652.538.980.000,-	9,78
2009	12.001.239.880.000,-	2,2	4.955.942.380.000,-	9,27

*Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, data diolah.*



Sedangkan besaran PDRB dengan minyak dan gas atas dasar harga konstan di Kabupaten Aceh Utara tahun 2008 secara agregat adalah sebesar Rp 6.249.434.900.000,- dan di tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp. 5.852.314.990.000,-. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian. Adapun besaran PDRB tanpa minyak dan gas atas dasar harga konstan pada tahun 2008 sebesar Rp. 2.646.425.320.000,- dan terjadi peningkatan pada tahun 2009 menjadi Rp. 2.743.577.570.000,- atau meningkat sebesar Rp. 97.152.250.000,- (3,67%).

Secara rinci perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan selama 2 tahun terakhir dapat disajikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2  
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara  
Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2007-2009

Tahun	PDRB Migas	Pertumbuhan (%)	PDRB Non Migas	Pertumbuhan (%)
2007	6.769.908.610.000,-	- 11,83	2.551.002.590.000,-	3,99
2008	6.249.434.900.000,-	- 7,69	2.646.425.320.000,-	3,74
2009	5.852.314.990.000,-	- 6,35	2.743.577.570.000,-	3,67

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, data diolah.

### **b. Laju Inflasi**

Berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia Lhokseumawe laju inflasi Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe naik dari 4,18 persen pada tahun 2008 menjadi 6,48 persen pada triwulan III 2009. Angka ini menurun drastis dari tahun 2007 dengan laju inflasi tercatat 11,47 persen. Penurunan laju inflasi yang begitu drastis pada tahun 2008 salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sementara laju inflasi kembali merangkak naik hingga triwulan III 2009 salah satunya disebabkan adanya penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden, disamping pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah (*government expenditure*) yang dilakukan pada pertengahan tahun.



Inflasi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 cenderung mendekati inflasi nasional dan lebih rendah dengan laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh serta Kota Medan. Pada tahun 2007 inflasi Kota Lhokseumawe lebih tinggi dari inflasi nasional dan Kota Medan tetapi masih lebih rendah dari tingkat inflasi Kota Banda Aceh. Hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga berdampak pada pendapatan dan belanja pemerintah.

Tingkat inflasi di Lhokseumawe menurun drastis jika dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2009, tingkat inflasi hanya 3,5 % jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 13,78 %. Penurunan inflasi disebabkan membaiknya situasi ekonomi setelah krisis ekonomi global di akhir tahun 2008, cukup seimbangannya jumlah permintaan dan penawaran, tidak adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, kondisi keamanan dan perdamaian yang tetap terjaga, berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh serta makin sempitnya range kenaikan harga akibat tingginya tingkat harga di Kabupaten Aceh Utara.

### **c. Tingkat Pengangguran**

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang tercermin dari program dan kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diarahkan pada penciptaan peluang dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Nilai lebih (*value added*) yang dihasilkan bidang tertentu seperti pendidikan yang mampu menghasilkan lulusannya pada semua strata pendidikan menjadi kurang bermakna apabila tidak berimplikasi pada berkurangnya jumlah pengangguran baik secara kuantitas maupun kualitas.

Apabila dicermati kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Utara terlihat bahwa jumlah angkatan kerja senantiasa berfluktuasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tahun 2007 jumlah angkatan kerja mencapai 205.549 orang menjadi 189.892 orang pada tahun 2008 atau berkurang sebanyak 15.657 orang. Jumlah ini kembali naik pada tahun 2009 menjadi 219.644 orang. Hal ini dipengaruhi karena semakin kondusifnya situasi Provinsi Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Utara khususnya sehingga mobilitas penduduk terutama angkatan kerja semakin meningkat.

Dari sisi jumlah pengangguran tercatat pada tahun 2007 sebanyak 27.440 orang atau 13,34 persen dari jumlah angkatan kerja. Sementara pada tahun 2008 jumlah



pengangguran terbuka turun sebanyak 820 orang sehingga total pengangguran menjadi 26.620 orang (14,02 %). Diperkirakan jumlah ini akan terus menurun pada tahun 2009 menjadi 24.260 orang. Meskipun jumlah pengangguran menunjukkan penurunan namun persentase pengangguran meningkat, hal ini disebabkan oleh penurunan angkatan kerja.

#### d. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah klasik kehidupan kemasyarakatan, yang selalu menjadi perhatian semua level pemerintahan. Kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui program dan kegiatan pembangunan diharapkan senantiasa berorientasi pada agenda penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan. Strategi-strategi yang diterapkan pemerintah diantaranya dengan proses identifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Utara tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara selama 2 tahun terakhir memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin 186.286 jiwa (33,16 %), menjadi 218.970 jiwa (27,56 %) pada tahun 2008. Dari data tersebut terlihat bahwa adanya penambahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara yang terjadi dari tahun 2007 sampai 2008, tetapi prosentasenya terhadap jumlah penduduk terjadi penurunan sebesar 5,60 persen.

Berdasarkan pendapatan perkapita dapat dilihat bahwa pendapatan penduduk Kabupaten Aceh Utara berada diatas garis kemiskinan dan terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Jumlah PDRB dengan minyak dan gas, Pendapatan Perkapita  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006 – 2009

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	P D R B (Migas) Harga Konstan 2000 (Rp Juta)	Pendapatan Perkapita Harga Konstan 2000 (Rp)
1	2006	502.288	7.678.358,49	15.286.764,74
2	2007	515.974	6.769.908,61	13.120.639,04
3	2008	526.710	6.245.483,60	11.857.605,08
4	2009	532.537	5.852.314,99	10.989.499,30

Sumber : BPS dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara, data diolah



Pendapatan perkapita Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2006 sampai tahun 2009 mengalami penurunan akibat berkurangnya PDRB di satu sisi dan penambahan jumlah penduduk di sisi yang lain.

## **2.2. Perkiraan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2011**

Berdasarkan trend pertumbuhan PDRB dalam 3 tahun terakhir dapat diprediksikan kondisi ekonomi makro pada tahun 2011, diharapkan akan tumbuh positif di atas 3 persen dengan asumsi bahwa, pertumbuhan sektor-sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan cenderung meningkat. Di samping itu adanya trend peningkatan pertumbuhan sektor bangunan/konstruksi yang terus menanjak dari tahun ke tahun. Asumsi lainnya adalah kecenderungan pertumbuhan positif dari sektor jasa-jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi makro.

Laju inflasi Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2008 hingga 2010 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 13,78 persen, hal ini disebabkan oleh sektor jasa-jasa, sektor listrik dan air minum serta sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2011, laju inflasi diperkirakan juga akan mengalami kecenderungan penurunan yang masih berkisar pada 1 digit yang diakibatkan oleh stabilnya harga BBM, namun perkiraan ini dapat berubah dengan asumsi apabila ada variabel lain yang mempengaruhinya seperti naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL).

Sementara trend perkembangan investasi terjadi peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan pulihnya kondisi keamanan. Peningkatan pertumbuhan investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan angka pengangguran dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, diprediksikan akan terjadi peningkatan jumlah investasi yang signifikan dengan adanya sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa calon investor baik dari dalam maupun luar negeri. Tingginya minat para investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Aceh Utara akan berimplikasi pada bergairahnya kegiatan sektor riil di daerah ini. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan sendirinya dapat mengurangi angka kemiskinan.



### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBK 2011**

### **3.1. Laju Inflasi Daerah**

Inflasi di Kabupaten Aceh Utara dihitung berdasarkan asumsi perhitungan pada kota Lhokseumawe. Inflasi tahun 2008 sebesar 4,18 persen dan 2009 sebesar 6,48 persen dibandingkan tahun 2007 sebesar 11,47 persen laju inflasi cenderung menurun. Kecenderungan ini dipicu oleh penurunan laju inflasi di Provinsi Aceh sebesar 3,72 persen.

Begitupun masih terjadi disparitas inflasi antara Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. Perbedaan inflasi tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan biaya transportasi, karena perbedaan biaya tersebut hanya akan berimbang pada perbedaan IHK (Indeks Harga Konsumen) yang menunjukkan tingkat harga di Banda Aceh lebih tinggi dibanding Lhokseumawe. Dari sisi supply, antara kota Banda Aceh dan Lhokseumawe tidak ada perbedaan yang signifikan karena pasokan barang sama-sama berasal dari Medan dan pendistribusian barang antara Medan-Banda Aceh tidak ada hambatan berarti.

Namun dari sisi demand, diperkirakan tingkat permintaan yang tinggi di Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan implikasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur pengelolaan dana otonomi khusus dan migas oleh Provinsi. Apalagi kondisi pasar yang belum sempurna (*imperfect market*), sehingga persaingan harga tidak terjadi. Hal inilah yang mendorong ekspektasi pelaku usaha untuk mengambil margin lebih tinggi di Banda Aceh.

### **3.2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tergambar dalam PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 tanpa migas sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian terutama sub-sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor perkebunan.

Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara diperkirakan akan melampaui 3 persen.



Tabel 3.1.

Peranan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Minyak dan Gas, Tahun 2005 – 2009 (Persentase)

No.	Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	50,91	50,20	44,81	44,10	43,18
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,30	1,34	1,18	1,19	1,19
3.	Industri Pengolahan	9,26	9,14	8,19	8,11	8,03
4.	Listrik dan Air Minum	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18
5.	Bangunan/Konstruksi	5,62	5,80	5,24	5,33	5,44
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,37	15,66	14,53	14,89	15,23
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	10,89	10,88	9,80	9,77	9,74
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,08	1,42	2,50	2,81	3,33
9.	Jasa-jasa	5,38	5,35	13,57	13,63	13,69
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, data diolah

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terjadi penurunan rata-rata 0,82 persen. Hal ini akibat dari menurunnya laju pertumbuhan sektor ini dan adanya peningkatan laju pertumbuhan dari sektor listrik dan air minum, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor-sektor jasa. Sektor pertanian mempunyai peranan terhadap PDRB sebesar rata-rata 44 persen selama 3 tahun terakhir, sehingga diperlukan perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah melalui program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan laju pertumbuhan sektor tersebut demi menjaga kontinuitas pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara pada tahun-tahun mendatang.

Dengan memperhatikan laju pertumbuhan masing-masing sektor pada tabel-tabel di bawah terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus meningkat dan mempunyai kontribusi terhadap PDRB kedua terbesar setelah sektor pertanian, kiranya sektor ini juga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk mengantisipasi menurunnya tingkat pertumbuhan PDRB.

Penurunan PDRB cenderung disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian.



Tabel 3.2.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara (Dengan Minyak dan Gas) Menurut  
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007 – 2009

No.	Sektor	PDRB (minyak & Gas) (jutaan rupiah)			Laju Pertumbuhan (persen)	
		2007	2008	2009	2008	2009
1.	Pertanian	1.996.283,64	2.146.176,33	2.281.132,81	7,51	6,29
2.	Pertambangan dan Penggalian	7.432.368,58	7.136.904,74	7.092.736,57	(3,98)	(0,62)
3.	Industri Pengolahan	270.728,55	283.688,47	297.831,35	4,79	4,99
4.	Listrik dan Air Minum	10.925,77	11.737,61	12.720,96	7,43	8,38
5.	Bangunan/Konstruksi	227.760,94	249.896,86	275.313,31	9,72	10,17
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	587.931,83	651.929,19	724.039,78	10,89	11,06
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	347.349,14	375.079,41	409.036,74	7,98	9,05
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	133.510,86	174.430,84	236.102,67	30,65	35,36
9.	Jasa-jasa	526.347,95	596.738,28	672.325,68	13,37	12,67
<b>Jumlah</b>		<b>11.533.207,25</b>	<b>11.626.581,73</b>	<b>12.001.239,88</b>	<b>0,81</b>	<b>3,22</b>

Sumber : BPS Aceh Utara, Data Diolah



Tabel 3.3.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara (Dengan Minyak dan Gas) Menurut  
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000  
Tahun 2007 – 2009

No.	Sektor	PDRB (Minyak & Gas) (jutaan rupiah)			Laju Pertumbuhan (persen)	
		2007	2008	2009	2008	2009
1	Pertanian	1.144.343,30	1.166.949,47	1.184.594,30	1,98	1,51
2	Pertambangan dan Penggalian	4.248.955,28	3.634.433,70	3.141.434,73	(14,46)	(13,56)
3	Industri Pengolahan	209.196,50	214.605,87	220.376,12	2,59	2,69
4	Listrik dan Air Minum	4.659,32	4.831,95	5.047,85	3,71	4,47
5	Bangunan/Konstruksi	133.735,69	141.030,48	149.146,65	5,46	5,76
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	371.121,78	393.982,67	417.729,40	6,16	6,03
7	Pengangkutan dan Komunikasi	250.173,44	258.472,16	267.233,70	3,32	3,39
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	63.940,75	74.482,85	91.291,46	16,49	22,57
9	Jasa-jasa	346.535,59	360.645,75	375.460,78	4,07	4,11
<b>Jumlah</b>		<b>6.772.661,65</b>	<b>6.249.434,90</b>	<b>5.852.314,99</b>	<b>(7,73)</b>	<b>(6,35)</b>

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, data diolah



Tabel 3.4.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara (Tanpa Minyak dan Gas) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007 – 2009

No.	Sektor	PDRB (tanpa minyak & gas) (jutaan rupiah)			Laju Pertumbuhan (%)	
		2007	2008	2009	2008	2009
1	Pertanian	1.996.283,64	2.146.176,33	2.281.132,81	7,51	6,29
2	Pertambangan dan Penggalian	44.215,01	45.949,16	47.439,07	3,92	3,24
3	Industri Pengolahan	270.728,55	283.688,47	297.831,35	4,79	4,99
4	Listrik dan Air Minum	10.925,77	11.737,61	12.720,96	7,43	8,38
5	Bangunan/Konstruksi	227.760,94	249.896,86	275.313,31	9,72	10,17
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	587.931,83	651.929,19	724.039,78	10,89	11,06
7	Pengangkutan dan Komunikasi	347.349,14	375.079,41	409.036,74	7,98	9,05
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	133.510,86	174.430,84	236.102,67	30,65	35,36
9	Jasa-jasa	526.347,95	596.738,28	672.325,68	13,37	12,67
<b>Jumlah</b>		<b>4.145.053,68</b>	<b>4.535.626,15</b>	<b>4.955.942,38</b>	<b>9,42</b>	<b>9,27</b>

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, data diolah



Tabel 3.5.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara (Tanpa Minyak dan Gas) Menurut  
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000  
Tahun 2007 – 2009

No.	Sektor	PDRB (tanpa minyak & gas) (jutaan rupiah)			Laju Pertumbuhan (%)	
		2007	2008	2009	2008	2009
1	Pertanian	1.144.343,30	1.166.949,47	1.184.594,30	1,98	1,51
2	Pertambangan dan Penggalian	30.049,26	31.424,12	32.697,31	4,58	4,05
3	Industri Pengolahan	209.196,50	214.605,87	220.376,12	2,59	2,69
4	Listrik dan Air Minum	4.659,32	4.831,95	5.047,85	3,71	4,47
5	Bangunan/Konstruksi	133.735,69	141.030,48	149.146,65	5,46	5,76
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	371.121,78	393.982,67	417.729,40	6,16	6,03
7	Pengangkutan dan Komunikasi	250.173,44	258.472,16	267.233,70	3,32	3,39
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	63.940,75	74.482,85	91.291,46	16,49	22,57
9	Jasa-jasa	346.535,59	360.645,75	375.460,78	4,07	4,11
<b>Jumlah</b>		<b>2.553.755,63</b>	<b>2.646.425,32</b>	<b>2.743.577,57</b>	<b>3,63</b>	<b>3,67</b>

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, data diolah

Berdasarkan perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara tahun 2007 dan 2009, pertumbuhan PDRB tahun 2011 diperkirakan sebesar 3 persen dengan asumsi sektor – sektor yang mempengaruhi pembentukan PDRB cenderung meningkat kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang kontribusinya semakin menurun dari tahun ke tahun akibat berkurangnya lifting migas.



## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **4.1. Pendapatan Daerah**

#### **4.1.1. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2011**

Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain – lain pendapatan yang sah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil, secara nyata tergambarkan pada prosentase PAD terhadap jumlah pendapatan daerah hanya sebesar 6,94 persen. Sumber PAD Kabupaten Aceh Utara diperoleh dari penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Total PAD tahun 2011 adalah Rp 49.498.060.600.-

Perkembangan pendapatan daerah dari sisi dana perimbangan pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2010. Penurunan ini diakibatkan oleh berkurangnya dana perimbangan sebesar 5,83 persen dari jumlah sebesar Rp. 686.500.589.742,- menjadi Rp. 648.668.024.000,- Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 73.717.238.500,- menjadi sebesar Rp. 14.070.859.300,- Jumlah keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp. 712.236.943.000,- yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 49.498.060.600,- dan dana perimbangan sebesar Rp. 648.668.024.000,- serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 14.070.859.300,-

#### **4.1.2. Target pendapatan daerah tahun 2011**

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011 direncanakan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 49.498.060.600,- dari posisi tahun 2010 sebesar Rp 38.504.000.000,- atau meningkat sebesar 28,5 persen.

Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari pendapatan asli daerah yang sah pada komponen pendapatan dari pengembalian. Pada sisi lain diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan pada komponen – komponen pendapatan lainnya.

#### **4.1.3. Strategi pemerintah daerah dalam mencapai target PAD**

Dalam upaya mencapai target pendapatan yang ditetapkan, pemerintah Kabupaten Aceh Utara menempuh beberapa upaya-upaya sebagai berikut:



- 1) Mempersiapkan qanun untuk ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan tujuan memperluas basis pajak/retribusi dengan pertimbangan :
  - a. Penetapan qanun tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - b. Tidak menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.
- 2) Meningkatkan pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan akses yang luas kepada masyarakat dan dunia usaha serta mengoptimalkan PAD.
- 3) Membuat beberapa peraturan Bupati sebagai regulasi untuk meningkatkan koordinasi dan mengurangi resiko kebocoran dalam pemungutan PAD. Menganalisis dan melakukan perhitungan potensi PAD.
- 4) Menghapus pajak-pajak dan retribusi daerah yang tidak produktif, atau biaya pungut lebih besar dari penerimaan.
- 5) Menyempurnakan tarif pajak dan retribusi melalui qanun (intensifikasi) terhadap objek pajak dan retribusi yang dinilai perlu, tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- 6) Reposisi dan revitalisasi peran DPKKD melalui upaya:
  - a. Mengoptimalkan fungsi DPKKD sebagai koordinator pendapatan daerah dalam hal perencanaan target penerimaan PAD, mengkoordinir penyusunan rancangan Qanun PAD, dan mengendalikan pemungutan PAD yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemungut.
  - b. Membenahi sistem pemungutan dan penyetoran PAD.
  - c. Meningkatkan SDM petugas (pengetahuan dan mentalitas)
- 7) Mendata ulang wajib pajak dan wajib retribusi sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam menunaikan kewajibannya.
- 8) Mengupayakan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha di daerah untuk memperbesar sumbangan pihak ketiga.
- 9) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi sebagai kontra prestasi/belanja jasa dari pembayaran retribusi kepada pemerintah daerah lebih intensif.



## **4.2. Belanja Daerah**

### **4.2.1. Kebijakan umum belanja daerah**

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) pada tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp. 712.236.943.900,- yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 545.118.310.919,- anggaran tersebut, dipergunakan untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga, serta dipergunakan untuk Belanja Langsung sebesar Rp 276.987.662.125,- anggaran yang ditempatkan pada belanja langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Kabupaten yang harus dilaksanakan.

Dalam perencanaan penggunaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperhatikan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang diharapkan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tupoksinya.

Untuk belanja tidak langsung kebijakan belanjanya diarahkan pada belanja pegawai dan belanja lainnya yang mendukung belanja tidak langsung. Jumlah belanja daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 822.105.973.044,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 545.118.310.919,- dan Belanja Langsung Rp. 276.987.662.125,-

### **4.2.2. Kebijakan belanja tidak langsung**

Kebijakan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

#### **1). Belanja Pegawai**

- Penganggaran Gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan kenaikan accres gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan.

2). Subsidi

Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

3). Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah

4). Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/aanggota masyarakat, dan partai politik secara selektif,tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

5). Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Gampong dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerataan pembangunan.

6). Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).

#### **4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah**

##### **A. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah**

###### **1. Penanggulangan Kemiskinan**

Agenda pembangunan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Meskipun pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang diarahkan pada upaya menurunkan angka penduduk miskin hingga akhir tahun anggaran 2009 belum signifikan mempengaruhi persentase penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara. Rendahnya



realisasi anggaran dari berbagai sumber pendanaan menjadi salah satu faktor utama lambannya penurunan angka kemiskinan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 antara lain; penyaluran beras miskin dan program kompensasi penanggulangan BBM, pembangunan rumah bagi kaum dhuafa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Disamping juga pemberdayaan dan revitalisasi koperasi dan usaha kecil menengah terus dibenahi dengan kegiatan pembinaan pengembangan sentra usaha kecil menengah melalui KSP/USP dan koperasi.

Pemberdayaan terhadap masyarakat miskin yang mengalami problema sosial juga tidak luput dari sasaran penanggulangan kemiskinan. Beberapa kegiatan seperti pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan, peningkatan kesejahteraan panti. Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi penyandang cacat, penyandang masalah sosial seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin yaitu;

**Pertama**, masih belum meratanya sebaran pembangunan terutama di daerah perdesaan. Jumlah masyarakat miskin di setiap gampong diperkirakan akan menurun pada tahun 2011 dengan adanya kesempatan berusaha bagi masyarakat. Kesempatan berusaha ini diharapkan dapat mendorong penciptaan tambahan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Pengangguran terbuka di daerah gampong masih lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama di daerah perdesaan. Sementara itu masyarakat miskin yang banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan disamping produktivitasnya yang relatif rendah.

**Kedua**, kemampuan masyarakat miskin untuk menjangkau pelayanan masih terbatas dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi masih sangat terbatas. Persoalan gizi buruk juga masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Disamping itu prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir juga masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat



miskin. Keseluruhan masalah ini akan ditangani secara sungguh-sungguh dalam tahun 2011 dengan program-program pembangunan yang lebih terintegrasi.

## **2. Peningkatan Kesempatan Kerja**

Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada tahun 2009 diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan ketrampilan dalam rangka wirausaha mandiri. Beberapa program yang dilaksanakan seperti peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang diimplementasikan dalam kegiatan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pelatihan ketrampilan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja di beberapa bidang masih belum menunjukkan grafik peningkatan serapan yang berarti, hanya bidang pertanian yang merupakan sektor basis perekonomian dan memiliki kontribusi sebesar 49,51 persen terhadap perekonomian tanpa migas yang mampu menampung tenaga kerja yang lebih banyak. Program unggulan seperti intensifikasi lahan terlantar, ekstensifikasi dan pembukaan lahan baru untuk perkebunan komoditas potensial, rehabilitasi areal pertambakan dan lain sebagainya telah dilaksanakan secara simultan pada tahun 2009.

Kesempatan dan peluang kerja di sektor formal maupun informal semakin hari semakin menurun yang dipicu oleh semakin kompetitifnya persaingan dengan mengedepankan kompetensi pendidikan dan keterampilan yang ada serta semakin berkurangnya kebutuhan akan pekerja yang telah tergantikan dengan mekanisasi. Ketersediaan data tenaga kerja yang akurat dan up to date di semua sektor masih menjadi permasalahan klasik yang seakan memperumit masalah ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan kurangnya dana pendukung operasional pendataan jumlah tenaga kerja serta kurangnya inisiatif calon pencari kerja untuk melakukan pendaftaran status ketenagakerjaannya.

Meskipun pada tahun 2011 diperkirakan akan tercipta kesempatan kerja baru dengan asumsi penyerapan anggaran pemerintah daerah bisa dilaksanakan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, angka pengangguran terbuka masih tetap tinggi. Pada sisi lainnya lapangan kerja formal pada tahun 2011 masih terbatas dari total lapangan kerja. Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal, tingginya angka penganggur usia muda, merupakan masalah-masalah yang akan ditangani pada tahun 2011. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Balai-balai pelatihan kerja, belum adanya aturan baku tentang sertifikasi kompetensi,



merupakan kendala-kendala yang akan diatasi dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Aceh Utara.

Beberapa masalah tersebut telah mendudukan kondisi ini pada beberapa tantangan yang harus diselesaikan ; **Pertama**, mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja.

Rendahnya pendidikan, keterampilan, dan kompetensi sebagian besar tenaga kerja menyebabkan terbatasnya kapasitas dan produktivitas sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Aceh Utara sehingga banyak dari tenaga kerja hanya mampu bekerja dengan produktivitas rendah. **Kedua**, meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang bekerja di lapangan kerja informal. Dengan terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, tidak semua pekerja dapat bekerja atau berpindah ke lapangan kerja formal. Pekerja di kegiatan informal ditingkatkan kesejahteraannya agar kesenjangan pendapatan antara pekerja formal dan informal tidak terlalu besar.

### **3. Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan**

Produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas relatif masih rendah. Pertumbuhan produksi komoditi pertanian penting selain padi seperti jagung, sayuran, buah-buahan dan daging serta komoditas perkebunan akan ditingkatkan. Meskipun produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun potensi yang belum dimanfaatkan masih cukup besar. Masalah-masalah ini akan diatasi guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mendorong akses rumah tangga pertanian terhadap sumber daya produktif; meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi; melanjutkan upaya revitalisasi penyuluhan pertanian; serta mengembangkan sistem agribisnis di perdesaan.

#### **a. Bidang Pertanian Tanaman Pangan**

Pembangunan bidang pertanian telah dilaksanakan dalam berbagai program dan kegiatan dalam upaya revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan.

Program pemberdayaan dan pedesaan petani telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), pengembangan intensifikasi tanam padi dan palawija dan pengembangan diversifikasi tanaman. Pembangunan pendukung infrastruktur pertanian juga telah dilaksanakan kegiatan



pengembangan irigasi tingkat usaha tani, pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna yang ditampung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Permasalahan yang dihadapi dalam sektor pertanian antara lain adalah adanya serangan organisme pengganggu seperti tikus, walang sangit, kepinding tanah, burung, penggerek batang keong mas dan ulat grayak. Disisi lain belum memadainya saluran pompanisasi yang telah dibangun terhadap kebutuhan saluran pompanisasi yang perlu dibangun sepanjang 65.400 meter. Kebutuhan akan pompanisasi juga sangat mendesak karena rata-rata lahan sawah yang ada di Kabupaten Aceh Utara adalah sawah tadah hujan dengan perkiraan kebutuhan pompa sebanyak 39 unit bangun baru dan yang perlu direhabilitasi sebanyak 50 unit.

Ketersediaan benih unggul/bersertifikat sangat kurang yang menyebabkan hasil produksi panen tidak memenuhi target.

Masih luasnya lahan yang belum tergarap juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam bidang pertanian dimana kebutuhan benih dan bibit yang sangat terbatas hingga banyak lahan yang terlantar.

Terbatasnya transportasi penyuluh karena daerah yang akan dijangkau cukup jauh hingga menghambat akses antara penyuluh dengan petani, serta rendahnya SDM Penyuluh hingga informasi yang berkenaan dengan pertanian terhambat sampai kepada para petani.

Tantangannya adalah (1). memperkuat kemampuan produksi pangan; (2). memperbaiki sistem distribusi dan tata niaga; (3). meningkatkan penguasaan dan peningkatan penguasaan teknologi; (4). mengembangkan sistem agribisnis di perdesaan; (5). meningkatkan infrastruktur pertanian.

#### **b. Bidang Perkebunan dan Kehutanan**

Program pembangunan bidang perkebunan pada tahun 2009 dititikberatkan beberapa program dan kegiatan yang berorientasi pada pelestarian hutan dan konservasi sumber daya hutan. Disamping juga difokuskan pada peningkatan produksi dari hasil perkebunan seperti program peningkatan produksi pertanian/produksi yang direalisasikan dengan kegiatan pemeliharaan tanaman karet, pengembangan gambir dan pengembangan tanaman pala, sawit dan kakao.

Dalam rangka pelestarian sumber daya hutan dan konservasi hutan pada tahun 2009 telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kerusakan



hutan. Kegiatan penghijauan daerah aliran sungai juga telah dilaksanakan sebagai upaya konservasi daerah aliran sungai dan pencegahan abrasi sungai.

Kurangnya pemeliharaan perkebunan rakyat oleh masyarakat sehingga produksi tidak maksimal. Dibidang Kehutanan banyak terjadinya illegal Logging dan perambahan hutan secara liar serta pembukaan lahan perkebunan yang tidak memperhatikan kelestarian hutan dan juga adanya gangguan satwa liar seperti gajah dan babi hutan yang merusak tanaman seperti sawit.

Tantangan dalam bidang perkebunan dan kehutanan adalah (1). membantu mengembangkan tanaman hutan khususnya tanaman hutan rakyat; (2). meningkatkan pengawasan terhadap ilegal Logging; (3). Penyediaan benih unggul bermutu; (4). Peningkatan infrastruktur pada wilayah sentra produksi perkebunan.

### **c. Bidang Peternakan dan Perikanan**

Bidang Peternakan dan perikanan pun telah melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan produksi hasil ternak melalui pengembangan inseminasi buatan dan reproduksi. Pada sisi lain Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak telah difokuskan pada kegiatan : (1). Pengembangan Inseminasi buatan dan reproduksi ; (2). Pemberantasan flu burung (*Avian Influenza*). (3). Kegiatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Peternakan (*Growth Center*).

Sedangkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan telah dilakukan beberapa program seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang diimplementasikan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi nelayan dalam rangka menaikkan pendapatan masyarakat pesisir khususnya nelayan. Dalam rangka meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, pada tahun 2009 pemerintah telah melakukan rehabilitasi dan normalisasi pada saluran tambak. Selain itu juga telah dibangun prasarana perikanan seperti docking Kuala Cangkoy, pembangunan balai nelayan dan kontruksi turap, bronjong dan talud TPI Tanah Jambo Aye yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus.

Permasalahan pada sektor peternakan antara lain adalah belum optimalnya sarana dan prasarana peternakan yang berdampak pada rendahnya produktivitas hasil yang dicapai, adanya wabah penyakit menular dan kurangnya mutu genetik ternak masyarakat, belum adanya akses pemasaran hasil ternak yang terpadu, juga masih rendahnya SDM dan kurangnya tenaga inseminator karena daerah yang dijangkau sangat luas tersebar di 27 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara .



Rendahnya tingkat penguasaan teknologi perikanan dan kelautan juga salah satu hambatan yang dialami oleh bidang perikanan dimana hasil tangkapan nelayan yang tersisa terbuang percuma atau terkadang hanya diolah secara sederhana yang nilai ekonominya rendah di pasaran, hingga pada terbatasnya akses permodalan yang berdampak pada tidak sehatnya siklus keuangan dan pendapatan nelayan.

Tantangan di bidang peternakan dan perikanan adalah (1). memperbaiki sistem permodalan dan investasi bagi nelayan dan pembudidaya ikan; (2). meningkatkan kualitas SDM petugas dan penyuluh; (3). memperbaiki sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil perikanan.

#### **4. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan Budaya**

##### **a. Bidang Pendidikan**

Pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2009 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Fokus pembangunan pendidikan masih diarahkan pada pemerataan akses pendidikan disamping juga peningkatan mutu pendidik. Program pemerataan akses seiring dengan program pemerintah pusat terutama dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar SD/MI menunjukkan trend positif pada tahun 2009. APM pendidikan jenjang SD/MI terjadi peningkatan sebesar 1,35 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara jenjang wajib belajar sembilan tahun terjadi kenaikan APM sebesar 1,94 persen. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah SMU/MA tingkat APM relatif stabil hanya sedikit mengalami kenaikan yaitu 38,93 persen pada tahun 2008 menjadi dan 39,70 persen di tahun 2009 atau naik sebesar 0,77 persen.

Demikian juga dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2009 untuk jenjang pendidikan dasar juga menunjukkan kenaikan yang relatif kecil dimana pada tahun 2008 sebesar 100,17 persen naik menjadi menjadi 100,27 persen pada tahun 2009 atau naik sebesar 0,10 persen. Hal ini juga terkait dengan tingginya angka mutasi siswa pada tingkat pendidikan dasar yang menyebabkan turunnya rasio siswa dengan jumlah penduduk usia sekolah. Demikian juga pada tingkat SMP/MTs juga sedikit pergeseran dari 79,20 persen menjadi 79,50 persen atau naik sebesar 0,30 persen.

Program pengurangan jumlah buta aksara di Kabupaten Aceh Utara terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah orang yang melek huruf.



Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) dari 96,11 persen pada tahun 2008 menjadi 96,20 persen atau terjadi kenaikan jumlah melek huruf sebesar 0,39 persen. Hal ini terjadi karena lancarnya program pemberantasan buta aksara melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut program Paket A,B dan C.

Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain di luar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transpor, dan uang saku menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Di samping itu sampai dengan tahun 2006 ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah gampong dan daerah terpencil masih terbatas. Hal tersebut menambah keengganan masyarakat miskin untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan.

Terbatasnya akses keluarga miskin terhadap pendidikan formal selayaknya dapat diatasi dengan penyediaan pelayanan pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup. Namun demikian pendidikan non formal yang memiliki fleksibilitas waktu penyelenggaraan dan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat miskin baik karena aksesibilitasnya maupun karena kualitasnya yang masih terbatas. Oleh sebab itu akses, kualitas dan format pendidikan non formal perlu terus dikembangkan untuk dapat memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin.

Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan. Data Dinas Pendidikan dan pengajaran 2006 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah karena harus bekerja.

Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh (1). ketersediaan



pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas; (2). kesejahteraan pendidik yang masih rendah; dan (3). fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi.

Bila dilihat dari jumlah tenaga pengajar di Kabupaten Aceh Utara dibandingkan dengan jumlah siswa sudah terjadi surplus antara rasio guru dengan murid 1:17 lebih besar dari rasio nasional 1:24. Dari data tersebut disatu sisi Kabupaten Aceh Utara kelebihan guru namun disisi lain masih ada kekurangan guru atau dengan kota lain distribusi guru yang tidak merata. Penyebab lain dari kurang aktifnya pembelajaran karena ada guru yang rangkap tugas.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan pendidikan menengah yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) yang menggunakan sistem guru mata pelajaran banyak pula terjadi ketidaksesuaian antara pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru. Di samping itu kesejahteraan pendidik baik secara finansial maupun non finansial dinilai masih rendah pula. Hal tersebut berdampak pula pada terbatasnya SDM terbaik yang memilih berkarir sebagai pendidik.

Demikian pula kondisi fisik sekolah, terbatasnya ruang kelas untuk tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar mengajar juga berdampak pada keengganan orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut.

Pada saat yang sama masih banyak pula peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain semakin memberatkan orangtua juga menyebabkan in-efisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa.

Permasalahan lainnya, manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak penyusunan rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan, tetapi kebijakan ini belum sepenuhnya menjadi perhatian pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan yang lebih kompetitif. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat, namun demikian pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan Masalah utama lainnya yang dihadapi adalah diperlukannya peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun hampir seluruh anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah, tetapi masih ada sebagian anak yang tidak bersekolah terutama karena alasan ekonomi atau tinggal



di daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan. Anak usia 13-15 tahun yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan paling tidak sampai dengan pendidikan dasar, sebagian tidak dapat bersekolah. Meskipun pemerintah telah menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang cukup signifikan untuk jenjang pendidikan dasar, namun masih ditemukan sekolah yang masih menarik berbagai iuran sehingga memberatkan orangtua, terutama bagi keluarga miskin. Studi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa dengan adanya program BOS, sebanyak 70,3 persen SD/MI dan SMP/MTs telah membebaskan siswa dari segala jenis pungutan untuk daerah Aceh Utara belum ada studi yang sama untuk merevaluasi kebijakan BOS.

Meskipun demikian besaran dana BOS belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan, sekolah swasta, dan sekolah unggulan.

Masalah penting lain yang dihadapi bidang pendidikan adalah berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas. Sebaran pendidik tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, sebagian besar pendidik masih belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Upaya peningkatan mutu pendidik penting dilakukan agar mereka dapat mengemban tugas dengan baik, sehingga satuan-satuan pendidikan dapat melahirkan lulusan-lulusan yang bermutu.

## **b. Bidang Kesehatan**

Pembangunan kesehatan dapat dievaluasi melalui pencapaian target indikator kabupaten sehat. Tingkat capaian kesehatan Kabupaten Aceh Utara dapat dinilai melalui beberapa indikator pengukuran antara lain strategi peningkatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan peningkatan Angka Usia Harapan Hidup (UHH) disamping menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan menurunnya prevalensi gizi buruk pada balita.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan terus berupaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) yang pada saat ini masih berada dibawah target nasional yaitu 307/100.000 kelahiran hidup sedangkan target nasional menargetkan penurunan sebesar 125/100.000 kelahiran hidup.

Pemerintah juga terus berusaha untuk menaikkan Angka Usia Harapan Hidup (UHH) bagi penduduk Kabupaten Aceh Utara. Data tahun 2007-2008 menunjukkan



tingkat usia harapan hidup rata-rata 67,89 tahun atau 2,73 tahun masih berada dibawah target nasional yaitu 70,62 tahun. Rendahnya capaian tingkat usia harapan hidup salah satu faktor adalah sangat sedikit usia kematian yang tercatat dalam masyarakat. Namun demikian pemerintah terus berupaya agar angka harapan hidup tercatat untuk dapat mengukur secara riil tingkat rata-rata harapan hidup.

Permasalahan yang menjadi kendala pada bidang kesehatan, diantaranya :

**Disparitas status kesehatan.** Disparitas status kesehatan antar golongan masyarakat masih sangat tinggi, disparitas tersebut terlihat dari Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan cakupan imunisasi pada golongan miskin lebih rendah dibanding dengan golongan kaya.

**Beban penyakit.** Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, diare, dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus dan kanker. Selain itu Kabupaten Aceh Utara juga menghadapi *emerging diseases* seperti demam berdarah dengue (DBD). Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, anak kurang gizi, dan gizi buruk, serta terdapatnya beberapa kasus lumpuh layu DBP dan TB menjadi masalah lain beban penyakit yang diderita masyarakat.

**Distribusi tenaga kesehatan tidak merata.** Secara kuantitas jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Utara hampir memadai, tetapi dari segi distribusi tenaga kesehatan masih terkonsentrasi didaerah perkotaan.

**Rendahnya status kesehatan penduduk miskin.** Angka kematian bayi pada kelompok termiskin adalah 61 orang dibandingkan dengan 17 orang per 1.000 kelahiran hidup. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita, seperti ISPA, diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran, lebih sering terjadi pada penduduk perdesaan. Penyakit lain yang banyak diderita penduduk miskin adalah penyakit tuberkulosis paru, dan malaria. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin dan perdesaan terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (cost barrier). Data Dinas



Kesehatan Kabupaten Aceh Utara menunjukkan bahwa sebagian besar masalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan antara lain: disparitas status kesehatan dan gizi antar tingkat sosial ekonomi, antarkawasan, dan antara perkotaan dan perdesaan; akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil; jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan belum memadai terutama di daerah terpencil, dan perbatasan; penyakit infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kesakitan seperti penyakit demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, malaria, diare, infeksi saluran pernafasan; masalah gizi kurang dan gizi buruk terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita, serta berbagai masalah gizi utama lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya; belum optimalnya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, dan keamanan pangan; serta perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan.

Di bidang keluarga berencana, pertumbuhan penduduk yang diperkirakan terus meningkat; angka Total Fertility Rate (TFR) di beberapa kecamatan yang cenderung meningkat; dan jaminan penyediaan alat/obat KB serta pelayanan KB bagi penduduk miskin yang belum optimal merupakan masalah dan tantangan pokok yang tetap harus dihadapi dalam tahun 2010.

### **c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

Pada tahun 2009 program pembangunan bidang kebudayaan masih terus dikembangkan dalam rangka pelestarian budaya daerah. Diantaranya telah dilaksanakan berbagai perlombaan kesenian dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Aceh Utara seperti perlombaan asmaul husna, do da idi, lomba tari kreasi untuk pemula. Pemerintah juga berpartisipasi aktif dalam beberapa ajang kebudayaan daerah seperti turut serta dalam acara North Aceh Expo, Pekan Kebudayaan Aceh dan even-even yang berskala nasional.

Disamping penguatan dibidang pelestarian budaya daerah, pemerintah juga melakukan program promosi budaya dan promosi objek-objek wisata seperti peremajaan



objek wisata yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Ajang promosi wisata dan budaya juga dikuatkan dengan pembinaan sanggar-sanggar seni budaya ada sehingga dapat mendukung agenda promosi wisata yang digelar di tingkat lokal maupun maupun skala nasional dan internasional.

Potensi budaya dan wisata di Kabupaten Aceh Utara seakan berjalan di tempat, kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dan tantangan pada tahun 2011. Potensi wisata masih terfokus pada sudut pandang wisata sejarah. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi wisata belum tertangani secara serius. Pada sisi lain promosi yang dilakukan hingga saat ini belum maksimal dan efektif sehingga gaung kebudayaan dan wisata Kabupaten Aceh Utara masih menjadi konsumsi lokal. Permasalahan yang tidak kalah pentingnya yang perlu dicari jalan keluarnya adalah masih terbatasnya aksesibilitas dan moda transportasi menuju dan pada lokasi wisata.

#### **d. Bidang Pemuda dan Olah Raga.**

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga pada tahun 2009 juga menunjukkan perkembangan yang positif. Sejumlah kegiatan penguatan kapasitas pemuda terutama pemuda putus sekolah seperti pelatihan kecakapan hidup (*life skill*), kewirausahaan dan pembinaan kemandirian pemuda seperti pelatihan pemasangan paving block, perbengkelan, ketrampilan menjahit/bordir dan ketrampilan pertukangan.

Demikian pula bidang olahraga, pembangunan dikonsentrasikan bagi pembinaan olahraga yang lebih luas manfaat dan perhatian bagi masyarakat. Disamping juga terus dilakukan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti pembangunan lapangan bola kaki dan lapangan voli yang menjadi sarana olahraga utama dalam masyarakat.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu segera disikapi secara arif terlihat seperti adanya pembinaan kepemudaan yang masih terfokus melalui organisasi kepemudaan KNPI sebagai akibat dari rendahnya dinamika wadah kepemudaan yang muncul dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai motivator dan fasilitator Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu menggali kembali wadah kepemudaan yang dapat memfasilitasi potensi pemuda di seluruh kecamatan hingga pedesaan.

Sementara itu terjadi degradasi mentalitas pemuda sebagai akibat semakin terbukanya akses informasi yang telah mempengaruhi pola pikir generasi muda dari muatan-muatan lokal dan agama. Hal ini perlu dipikirkan mengingat kompetisi yang semakin terbuka dalam setiap sisi kehidupan membutuhkan kader muda yang siap secara fisik dan psikis.



Dalam bidang olah raga pembinaan olah raga juga masih minim penghargaan sehingga masyarakat memandang olah raga sekedar hobi yang tidak perlu prestasi, hal ini sangat berpengaruh pada penciptaan dan peningkatan prestasi olah raga yang berimbas pada semangat masyarakat untuk berolahraga. Pada sisi lain tindak lanjut kompetisi olah raga tingkat kabupaten untuk setiap cabang yang dipertandingkan belum meningkat pada pembinaan tingkat selanjutnya sehingga program pencarian bibit dan penciptaan prestasi hanya bersifat sporadis.

## **5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

Dukungan infrastruktur dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat pada tahun 2010 masih menghadapi masalah dan tantangan antara lain: masih kurang memadainya pelayanan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal; masih kurang memadainya dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan dukungan sektor riil.

Dalam bidang sumber daya air, masalah bencana banjir di wilayah lumbung pangan lokal semakin meningkat akibat perubahan tata guna lahan dan degradasi lingkungan serta belum memadainya keandalan prasarana pengendali banjir. Selain itu keandalan prasarana sumber daya air penyedia air baku menurun akibat terjadinya percepatan sedimentasi. Intensitas abrasi pantai di wilayah pesisir juga meningkat terutama pasca bencana tsunami tahun 2004. Kinerja jaringan irigasi juga belum memadai dalam memenuhi kebutuhan air usaha tani terutama untuk pencapaian produksi padi. Dari total jaringan irigasi yang telah terbangun, masih terdapat cukup panjang jaringan irigasi yang belum atau tidak berfungsi karena belum lengkapnya sistem jaringan ketersediaan air, kurang siapnya lahan sawah, tidak siapnya petani penggarap, serta terjadinya konversi penggunaan lahan. Selain itu, pada jaringan irigasi yang telah berfungsi juga mengalami kerusakan karena kurang optimalnya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi Dan Pemeliharaan (AKNOP) serta akibat bencana alam.

Pembangunan bidang transportasi masih menghadapi permasalahan: masih terbatasnya tingkat jaminan keselamatan dan keamanan transportasi yang antara lain disebabkan oleh lemahnya kesadaran pengemudi dan pengguna jasa transportasi; kelaikan prasarana dan sarana; rendahnya akses terhadap pelayanan transportasi khususnya untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil



dan terisolir. Tantangan yang dihadapi pada sektor transportasi adalah: masih tingginya tingkat kecelakaan serta pelanggaran ketentuan dan penyelenggaraan transportasi; terbatasnya prasarana dan sarana transportasi di kawasan yang terpencil dan terisolir menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan baik untuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan tertinggal. Bidang transportasi ini capaian pelaksanaan pembangunannya dapat dilihat melalui beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan, antara lain :

➤ Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program pembangunan jalan dan jembatan pada tahun 2009 telah meningkatkan jaringan jalan strategis Kabupaten Aceh Utara sepanjang 251.782 m. Disamping itu program ini juga meningkatkan beberapa ruas jalan Kabupaten lainnya sepanjang 140.105 m dan membangun 38 unit jembatan dan gorong-gorong plat beton. Hal ini telah memperlancar arus transportasi dan membuka daerah terisolir di Kabupaten Aceh Utara.

➤ Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan, sehingga jaringan jalan di Kabupaten Aceh Utara selalu dapat dilintasi sepanjang tahun. Pada tahun 2009 panjang ruas jalan yang telah dipelihara baik dengan dana APBK Aceh Utara maupun dana DAK untuk sub bidang infrastruktur jalan adalah sepanjang 74.400 m dan pemeliharaan jembatan dan gorong-gorong plat beton sebanyak 17 unit.

➤ Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana di perdesaan meliputi peningkatan jalan dan jembatan desa. Pada tahun 2009 telah meningkatkan jalan-jalan desa sepanjang 72.746 m dan membangun jembatan dan gorong-gorong plat beton perdesaan sebanyak 18 unit.

Pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada beberapa masalah pokok antara lain: masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak; masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang layak; serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan. Dengan permasalahan yang dihadapi, pembangunan perumahan dan permukiman memiliki tantangan untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan



rendah, atau minimal membuka akses kredit lunak melalui paket kebijakan nasional yang dikerjasamakan dengan paket kebijakan daerah, disamping itu dalam rangka membangun kuliatas perumahan dan permukiman yang sehat, diperlukan langkah-langkah konkret dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase.

#### **a. Bidang Pengairan**

Pencapaian program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya diprioritaskan pada kegiatan peningkatan dan pemeliharaan prasarana irigasi untuk meningkatkan luas areal sawah berfungsi secara optimal dari luas areal sawah yang tersedia (potensial). Pada tahun 2009 kondisi luas areal persawahan potensial secara umum di Kabupaten Aceh Utara mencapai  $\pm$  41.503 Ha dengan luas lahan fungsional seluas  $\pm$  36.018 Ha.

Sampai dengan tahun anggaran 2009, pelaksanaan peningkatan jaringan irigasi telah berhasil mempermanenkan saluran primer sepanjang 52.862 m dan saluran sekunder 159.662 m pada D.I Krueng Tuan, D.I Alue Ubay, D.I Krueng Pase Kiri, D.I Krueng Pase Kanan, D.I Jambo Aye. Hal ini akan memperlancar pengaliran air ke areal persawahan dan meningkatkan hasil pertanian.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya juga melakukan kegiatan pemeliharaan yang bersifat rutin terhadap sarana dan prasarana irigasi yang telah ada, guna mencegah kerusakan pada jaringan irigasi dan mempertahankan suplai air baku pada areal-areal persawahan.

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pendamping dari APBK Aceh Utara, pada tahun 2009 telah dapat memelihara sebanyak 46 daerah Irigasi perdesaan.

Pengelolaan jaringan irigasi juga melibatkan peran serta masyarakat khususnya partisipasi dari masyarakat petani pemakai air untuk menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi serta membangun kemandirian P3A dalam mengelola irigasi. Pemberdayaan dan pengembangan Petani Pemakai Air (P3A) setiap tahun dilaksanakan untuk melatih P3A dalam menangani administrasi dan teknis jaringan irigasi dan pada tahun 2009 juga dilakukan pelatihan terhadap 42 P3A. Dan dalam mengatasi permasalahan pada bidang irigasi juga telah dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara.

Dengan adanya terlaksananya program ini diharapkan kebutuhan air irigasi dan pengelolaanya bisa terpenuhi secara optimal dan musim tanam 2 kali dalam setahun dapat terealisasi tanpa adanya hambatan.



Mengingat sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Utara hidup dari sektor pertanian, pembenahan dan pembangunan infrastruktur irigasi dan penanganan daerah-daerah aliran sungai menjadi prioritas utama mengatasi permasalahan di bidang pengairan. Permasalahan/hambatan dan tantangan yang akan dihadapi antara lain :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
  - Sering terjadi kerusakan pada saluran irigasi karena saluran belum dilening yang mengakibatkan sedimentasi pada beberapa aliran primer dan sekunder selain itu banyak juga cross drain mengalami kebocoran disana-sini yang berdampak terganggunya proses distribusi air irigasi ke areal persawahan.
  - Penyadapan liar air banyak terjadi pada saluran pembawa baik primer maupun sekunder yang mengakibatkan kelancaran air terganggu.
  - Permasalahan pembebasan tanah masyarakat (ganti rugi tanah) yang menghambat pelaksanaan pekerjaan.
  - Jadwal petani turun ke sawah dan musim tanam padi petani belum serentak.
2. Terbatasnya dana yang tersedia untuk menangani luasnya wilayah/panjangnya jaringan irigasi yang ada.
3. Design konstruksi kurang optimal karena belum mempunyai tenaga pengairan yang profesional.

Tantangan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya adalah :

- Melakukan upaya peningkatan kualitas bangunan irigasi dari status irigasi semi teknis menjadi irigasi teknis secara bertahap.
- Pengembangan dan perluasan jaringan irigasi ke wilayah irigasi yang potensial.
- Mempertahankan dan memelihara jaringan irigasi yang ada agar tetap berfungsi dengan baik dan optimal.

1. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Program ini dilaksanakan sebagai usaha dalam menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi dari sumber daya air. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2009 adalah : (a). Pembangunan waduk sebanyak 1 unit; (b). Pemeliharaan dan rehabilitasi bendung sebanyak 2 unit.



Permasalahan utama dari Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya adalah terjadi fluktuasi debit air di musim penghujan dan musim kemarau, hal ini dikarenakan oleh kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis akibat perambahan pepohonan sepanjang hulu sungai serta perambahan kawasan penyangga hutan, yang mengakibatkan tingginya intensitas banjir di hulu-hulu sungai.

Tantangan dari Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya adalah memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya dengan cara menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu yang diperlukan.

## 2. Pengendalian Banjir.

Program pengendalian banjir menitikberatkan pada rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai guna terhindar dari erosi dan mencegah kerusakan akibat bencana alam banjir, sehingga dapat mengurangi dampak kerugian bagi masyarakat. Pada tahun 2009 tebing atau tanggul sungai yang ditangani sepanjang 3.645 m pada 5 sungai yaitu Kr. Sawang, Kr. Nisam, Kr. Keureuto, Kr. Arakundo dan Kr. Pase.

Permasalahan dari pengendalian banjir adalah :

- Sering terjadi longsoran pada tebing-tebing sungai di saat musim penghujan akibat arus yang cukup deras yang mengakibatkan areal pertanian dan permukiman masyarakat terendam banjir.
- Permasalahan pada waktu pelaksanaan dan jadwal penyelesaian pekerjaan perkuatan tebing dan perbaikan tanggul sungai terjadi pada musim penghujan sehingga menjadi hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan.
- Permasalahan pembebasan tanah masyarakat (ganti rugi tanah) yang menghambat pelaksanaan pekerjaan galian saluran pembuang/ normalisasi sungai.

Tantangan dalam penanganan pengendalian banjir adalah melakukan upaya pencegahan sedimentasi pada daerah aliran sungai karena bisa berakibat pada terganggunya fungsi sungai dan tersumbatnya beberapa muara/kuala sungai.

### **b. Bidang Lingkungan Hidup**

Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup yang telah dicapai pada tahun 2009 secara umum masih pada kesadaran para pemangku kepentingan kegiatan pembangunan terhadap pentingnya kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan yang sehat dan terjaga dalam keseimbangan ekosistem lingkungan yang baik. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada bidang ini masih bersifat rutin dan terkesan belum



efektif dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap lingkungan hidup. Dalam upaya pelestarian lingkungan terutama untuk mencegah kerusakan lingkungan, maka dengan Dana Alokasi Khusus telah dilakukan penanaman pohon di luar kawasan hutan.

Upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan terutama terhadap penyusunan AMDAL. Berbagai variabel pendukung menjadi bagian fokus yang dipersiapkan untuk memperkuat fungsi pengawasan lingkungan yang dijalankan. Perhatian pada penguatan kawasan rawan bencana yang telah dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus dengan sistem reboisasi masih perlu ditindak lanjuti pada sebaran daerah yang belum tergarap.

Pengelolaan lingkungan hidup semakin menuntut keseriusan penanganannya. Permasalahan dan tantangan berat bagi pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan sangat terasa karena tidak memadainya prasarana dan sarana serta sumber daya manusia pendukung baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga mengakibatkan target yang ingin dicapai menjadi tidak maksimal. Sumber daya manusia pengelola laboratorium lingkungan baik secara kuantitas dan kualitas juga masih sangat kurang memadai. Alat ukur kualitas lingkungan masih sangat kurang sehingga parameter yang terukur masih sangat sedikit.

Maka dari itu perlu dilakukan penguatan laboratorium lingkungan mengingat hingga saat ini laboratorium lingkungan yang dimiliki belum menjadi laboratorium rujukan bagi evaluasi kualitas lingkungan.

### **c. Bidang Kebersihan**

Pembangunan Bidang Kebersihan mencakup kebersihan lingkungan permukiman dan menciptakan perkotaan yang asri, dan untuk mencapai hal tersebut, maka pada tahun 2009 konsentrasi bidang kebersihan masih pada operasional pembersihan sampah di daerah – daerah yang strategis terutama ibukota kecamatan dan wilayah yang memiliki penduduk yang padat serta pembuatan taman-taman kota. Pada sisi lain juga dipersiapkan masyarakat supaya sadar akan kebersihan terutama dalam pengelolaan sampah. Dalam mencapai hal tersebut pada tahun anggaran 2009 diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Penyadaran masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengelola sampah yang diproduksi oleh rumah tangga dan lingkungannya masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan himbauan dalam menjaga kebersihan lingkungan permukimannya.



Tantangan dan permasalahan yang masih harus dihadapi hingga saat ini untuk kelancaran bidang kebersihan terlihat pada masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, pada sisi lain SDM pengelola sampah yang masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas demikian pula dengan prasarana dan sarana pendukung kebersihan lainnya. Sarana pengelolaan persampahan yang tersedia sangat terbatas baik kontainer tidak memadai, maupun fasilitas pengangkutan belum optimal. Alat bantu angkutan sampah juga ditunjang oleh gerobak sampah yang dibantu oleh BRR NAD – Nias hingga saat ini masih membutuhkan biaya pemeliharaan dari daerah. Sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih bergabung dengan TPA Alue Ulim Kota Lhokseumawe jika dilihat dari bentang wilayah layanan kebersihan Kabupaten Aceh Utara maka dibutuhkan TPA pada lokasi yang dapat menampung wilayah layanan yang pendek (misalnya di Lhoksukon dan Krueng Mane). Sementara itu masih rendahnya komitmen para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan persampahan yang mempengaruhi biaya operasional persampahan yang masih kurang proposional, juga diharapkan realisasi distribusi kebersihan dapat didistribusikan kembali untuk mendongkrak kinerja bidang kebersihan.

#### **d. Bidang Pertamanan**

Agenda pembangunan bidang pertamanan masih dianggap sebagai agenda pembangunan pelengkap dalam pembangunan daerah padahal pengelolaan ruang terbuka pada hakikatnya adalah pengelolaan ruang terbuka di pusat – pusat kegiatan masyarakat agar masyarakat memiliki ruang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam sebuah ruang bersama baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Dalam konteks sustainable development hingga akhir tahun 2007 pengelolaan ruang terbuka hijau melalui agenda penghijauan hasil yang dicapai sangat tidak terasa akibat tidak berkelanjutannya kegiatan ini sedangkan lahan-lahan budidaya terutama yang strategis yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penghijauan masih sangat luas. Pada sisi lain hasil penghijauan tidak maksimal akibat tingginya tingkat kematian tanaman yang ditanam sedangkan jumlah tanaman yang ditanam juga masih sangat terbatas.

Pemetaan ruang terbuka hijau yang dapat dikelola dengan pendekatan estetika dan fungsi reduksi polusi di pusat-pusat pertumbuhan yang strategis di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai cakupan tugas bidang pertamanan belum dilakukan. Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab pola pengelolaan ruang terbuka hijau belum dapat dirasakan manfaatnya.



#### **e. Bidang Perhubungan**

Permasalahan dan tantangan terjadi terlihat pada rendahnya optimasi kapasitas jalan terutama masih banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan damaja dan damija bagi kegiatan sosial ekonomi. Kondisi ini juga diperberat dengan rendahnya kondisi prasarana jalan yang rata-rata semakin menurun kemampuan pelayanannya.

Kesadaran pemakai sarana transportasi yang masih rendah juga menambah permasalahan pada tingginya jumlah kecelakaan, hal ini juga ditambah dengan kompetisi tidak sehat antar moda angkutan dan rendahnya tingkat kelaikan armada (angkutan penumpang dan barang) serta rendahnya kelaikan fasilitas keselamatan di jalan.

Untuk meningkatkan akselerasi pembangunan maka perlu dipikirkan juga kendala akibat sumber daya perhubungan yang masih terbatas baik prasarana, sarana, maupun SDM dalam bidang ini. Hal ini mengakibatkan konsentrasi pengelolaan kegiatan pembangunan masih terfokus pada perhubungan darat.

#### **6. Peningkatan Investasi, Industri, perdagangan dan Koperasi**

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat mempengaruhi investasi, upaya yang dilakukan melalui program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan pemeliharaan jalan

Proses investasi tahun 2008 lebih diarahkan pada program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi guna pengembangan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi khususnya investasi dan perdagangan, dengan tetap melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan dunia usaha. Di bidang perkebunan dan kehutanan program yang mendukung pengembangan investasi program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan melalui kegiatan pengembangan bibit unggulan pertanian

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada tahun 2006 lebih menekankan program kegiatan pada pemberdayaan usaha skala mikro, ketahanan pangan, peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2008 untuk bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lebih menekankan pada pelatihan manajemen pengelolaan sentra industri kecil dan pelatihan peningkatan mutu produksi industri kecil. Pencapaian tahun 2008 adanya



peningkatan teknologi industri berbasis komoditi unggulan daerah dengan tetap memperhatikan industri-industri komoditi potensial yang tumbuh berkembang baik yang telah mendapat pembinaan maupun yang belum.

Permasalahan/hambatan bidang penanaman modal diantaranya adalah belum jelasnya regulasi dan jaminan kebijakan investasi di daerah, terutama dalam pelayanan perijinan dan pemberian keringanan pajak, kepastian hukum dalam melaksanakan usaha, perbaikan prasarana transportasi darat, laut dan udara serta prasarana telekomunikasi, listrik dan air, masih kurangnya minat usahawan Aceh Utara bergerak dalam bidang investasi, pertanian, industri, pariwisata dan pertambangan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan yang berarti pada tahun 2009, dukungan investasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu diperkokoh.

Tahun 2010 rencana investasi terutama yang berasal dari dalam negeri telah mulai dijangkau tetapi minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Aceh Utara relatif masih dalam fase menunggu. Demikian juga industri pengolahan masih tumbuh di bawah potensinya.

Upaya untuk meningkatkan investasi, mendorong industri pengolahan nonmigas, meningkatkan penerimaan ekspor akan ditingkatkan secara sungguh-sungguh. Tantangan ini semakin besar dengan kemungkinan melambatnya perekonomian nasional dan meningkatnya persaingan antar daerah baik dalam menarik investasi maupun mempertahankan pangsa pasarnya. Perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya dukung ekspor akan ditangani dengan mengurangi hambatan perijinan, meningkatkan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah.

Permasalahan di bidang Usaha Menengah Kecil Dan Mikro yaitu rendahnya produktivitas. Produktivitas per unit usaha tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, yaitu produktivitas usaha mikro dan kecil masih rendah. Kinerja seperti itu berkaitan dengan: (a). rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan (b). rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku dan antargolongan pendapatan, termasuk penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing.



Perkembangan jumlah UMKM yang meningkat dari segi kuantitas belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai khususnya skala usaha mikro di Kabupaten Aceh Utara.

Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Disamping persyaratan pinjamannya juga tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar masih memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi.

Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.

**Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.** Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi dikarenakan pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (best practices) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di Aceh utara, hal ini dikarenakan oleh Pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya kebutuhan/kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya, sehingga kehilangan jati dirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya / mandiri. Kedua, banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi moderen sebagaimana layaknya sebuah badan usaha. Ketiga, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan serta prinsip-prinsip koperasi. Akibat langsung yang dapat dirasakan meliputi : (i). kinerja dan kontribusi koperasi dalam



perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya; dan (ii). citra koperasi di mata masyarakat kurang baik. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi.

Pada sektor perindustrian permasalahan yang dihadapi yakni banyaknya industri kecil menengah yang pengelolaannya masih sangat tradisional (sistem kekeluargaan) dan struktur organisasinya tidak jelas, umumnya tingkat pendidikan para pengelola sangat rendah.

Sektor perdagangan permasalahan yang dihadapi adalah prosedur pada perizinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan. Permasalahan lainnya berupa lemahnya kelembagaan perdagangan yaitu lembaga perlindungan konsumen, kemetrolagian dan kelembagaan persaingan usaha. Disamping itu juga prasarana dan sarana penunjang perdagangan masih rendah.

## **7. Pengembangan Syi'ar Islam**

Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah tetap menjadi prioritas dalam rangka meralisasikan program keistimewaan Aceh. yang dicanangkan pemerintah atasan. Hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2009 ditinjau dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah meningkatnya pemahaman Kehidupan Beragama dengan kegiatan pembinaan keagamaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan, pembinaan zakat dan baitul mal. Selanjutnya pembinaan remaja masjid, pembinaan majelis taklim dan safari Ramadhan juga menjadi prioritas pengembangan syiar Islam.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2009 juga telah melakukan pemberdayaan tenaga keagamaan seperti tenaga pendidik agama, para imum baik masjid, meunasah maupun imum mukim. Pada tahun tersebut juga telah dilaksanakan penertiban dan pembinaan pelanggar syariat Islam dengan mengintensifkan operasional wilayahul hisbah ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. telah diimplementasikan melalui penegakan syariat Islam sejak tahun 2002. Dalam realitanya bila kita sedikit jujur implementasinya masih pada tataran wacana, mengingat pelaksanaan syariat Islam sepenuhnya diaktualisasikan dalam



kehidupan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba, penjudian sering muncul kepermukaan, hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa alasan antara lain dikarenakan oleh belum konsistensinya kebijakan dengan implementasi sehingga penegakan syariat masih pada slogan, disamping kapasitas aparatur penegakan syariat belum juga memadai baik dari kualitas maupun dari kuantitas.

### **8. Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi**

Pencapaian Penegakan Hukum pada Tahun 2008 masih berada dalam penguatan kelembagaan melalui beberapa diantaranya; (1). Program Penataan Peraturan Perundangan; (2). Program Peningkatan Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum; (3). Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum; (4). Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; (5). Program Sosialisasi Peraturan Perundangan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mengambil beberapa kebijakan untuk tahun 2008 yang tertuang dalam beberapa program dalam rangka pemberantasan korupsi. Adapun program pembangunan dalam tahun 2008 antara lain (1). Program Peningkatan Sumber Daya Manusia; (2). Program Pengawasan Aparatur Pemerintah; (3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah; (4). Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara.

Untuk Tahun 2007 Program yang dilaksanakan antara lain (1). Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (2). Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; (3). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; (4). Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah; (5). Program Pengembangan Data Informasi; (6). Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pencapaian reformasi birokrasi pada tahun 2008 masih berada dalam penguatan kelembagaan melalui beberapa program diantaranya; (1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (2) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas; (3) Program Pendidikan Kedinasan; (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; (5) Program Pembinaan Pengembangan Aparatur.

Pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan masih sering tidak diambil tindakan yang tegas, pada sisi lain adanya peraturan yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan daerah. Sikap apatisisme mayoritas masyarakat



menjadi masalah lain dalam proses penegakan hukum sebagai reaksi inkonsistensi aparat penegak hukum dalam implementasi di lapangan.

Hambatan dan tantangan penegakan hukum yang dihadapi hingga saat ini diakibatkan oleh masih terbatasnya tenaga di bidang hukum yang handal dan profesional, inkonsistennya penerapan hukum di lapangan, dan kurangnya pemahaman dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Pemberantasan korupsi masih bersifat secara temporer dan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh untuk setiap adanya pelanggaran dari tahap awal sampai dengan penerapan sanksi kepada pelaku tindak korupsi dan pemberantasan korupsi hanya sebatas slogan tanpa disertai dengan tindakan tegas dan sanksi yang berat. Pengawasan yang lebih luas harus diberikan kepada masyarakat untuk memantau setiap hasil pembangunan apabila terjadi penyimpangan apakah telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan harus diberikan fasilitas yang memadai kepada aparat penegak hukum untuk menghindarinya kolusi korupsi dan nepotisme (KKN).

Sistem kerja aparatur pemerintah telah mengalami degradasi sehingga berada pada posisi terbalik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan pekerjaan masih dilakukan sebagai rutinitas miskin kreasi dan inovasi. Pola rekrutmen dan penempatan personil yang ada saat ini menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu SDM birokrasi.

Dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan komitmen dan dukungan dari para penyelenggara negara untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh SKPD terutama SKPD yang secara langsung menangani layanan umum secara konsisten dan berkelanjutan. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Langkah ini akan dipercepat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan terutama dalam bidang pertanahan, investasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik, sistem administrasi kependudukan, dan pengelolaan One Stop Service. Perhatian besar juga diberikan melalui tunjangan prestasi kerja (TPK) dalam rangka menutupi rendahnya gaji PNS melalui langkah penerapan sistem remunerasi PNS yang berbasis prestasi kerja, rendahnya kinerja PNS dalam melaksanakan tugas-tugasnya, belum sinerginya pelaksanaan pengawasan oleh berbagai instansi pengawasan terkait dan lemahnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan akan menjadi fokus perbaikan pada tahun 2011.



Dengan demikian tantangan yang dihadapi untuk memecahkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas adalah: meningkatkan kemampuan aparat Satpol-PP dan kerjasama dengan aparat kepolisian dalam meningkatkan ketertiban umum secara lebih optimal dalam menghadapi ancaman-ancaman ketertiban dan keamanan termasuk dalam hal memberikan dukungan pencegahan dan penanggulangan aksi-aksi teror dan sebagainya.

## **B. Strategi dan Prioritas**

Kebijakan untuk belanja langsung diarahkan pada pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan visi dan misi Bupati dan prioritas pembangunan daerah yang meliputi:

### **1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional I (PKN I) Lhokseumawe dan sekitarnya. Hal ini menjadikan Kabupaten Aceh Utara sebagai prioritas pengembangan pada lima tahun pertama oleh Pemerintah Pusat.

Penanganan bidang infrastruktur yang mendesak antara lain akibat masih kurang memadainya pelayanan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar dan masih kurang memadainya dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan dukungan sektor riil.

Dalam bidang sumber daya air, masalah bencana banjir di wilayah lumbung pangan lokal semakin meningkat akibat perubahan tata guna lahan dan degradasi lingkungan serta belum memadainya kehandalan prasarana pengendali banjir. Selain itu kehandalan prasarana sumber daya air penyedia air baku menurun akibat terjadinya percepatan sedimentasi. Intensitas abrasi pantai di wilayah pesisir juga terus meningkat.

Kondisi jaringan irigasi yang belum memadai dalam meningkatkan luas areal persawahan yang potensial dapat menjadi luas areal fungsional yang optimal. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan petani. Dari total jaringan irigasi yang telah terbangun, masih terdapat jaringan irigasi yang cukup panjang yang memerlukan peningkatan. Selain itu, pada jaringan irigasi yang telah berfungsi juga perlu pemeliharaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dengan melibatkan masyarakat petani.

Pembangunan bidang transportasi masih menghadapi permasalahan pada terbatasnya tingkat jaminan keselamatan dan keamanan transportasi yang antara lain disebabkan oleh lemahnya kesadaran pengemudi dan pengguna jasa transportasi;



kelaikan prasarana dan sarana; rendahnya akses terhadap pelayanan transportasi khususnya untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan terisolir.

Pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada beberapa masalah pokok antara lain: masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak; masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang layak akibat masih kurangnya sarana air bersih dan sanitasi.

Penanganan pada bidang jalan untuk tahun 2011 masih diprioritaskan pada pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Aceh Utara terutama penuntasan jalan-jalan strategis, pembangunan jalan elak (nasional), dan pembangunan jalan menuju tempat bersejarah dan wisata, serta jalan perdesaan atau usaha tani. Disamping itu pemeliharaan jalan dan jembatan masih memerlukan perhatian guna menjamin kelancaran arus transportasi barang dan jasa sepanjang tahun.

#### **a. Bidang Pengairan**

Penduduk Kabupaten Aceh Utara yang sebahagian besar hidup dari sektor pertanian, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi serta penanganan daerah-daerah aliran sungai menjadi prioritas utama dalam mengatasi permasalahan di bidang pengairan. Program-program bidang pengairan yang diperlukan pada tahun 2011 antara lain :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
  - Sering terjadi kerusakan pada saluran irigasi karena belum seluruhnya saluran irigasi dibangun secara permanen, dan terjadinya sedimentasi pada beberapa saluran primer dan sekunder yang berdampak terganggunya proses distribusi air irigasi ke areal persawahan.
  - Terbatasnya dana yang tersedia untuk menangani luasnya wilayah/panjangnya jaringan irigasi yang ada, serta belum adanya penerapan terhadap wewenang penanganan daerah irigasi sesuai luas daerah irigasi.
  - Belum tersedianya design konstruksi terutama bangunan-bangunan irigasi yang akan dibangun.



## 2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Permasalahan utama dari Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya adalah terjadi fluktuasi debit air di musim penghujan dan musim kemarau, hal ini dikarenakan oleh kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis akibat perambahan pepohonan sepanjang hulu sungai serta perambahan kawasan penyangga hutan, yang mengakibatkan tingginya intensitas banjir di hulu dan hilir sungai. Sehingga diperlukan penanganan terutama terhadap muara-muara dan pembendungan beberapa sungai besar di Kabupaten Aceh Utara

## 3. Program Pengendalian Banjir.

Permasalahan dari pelaksanaan program pengendalian banjir adalah :

- ❖ Sering terjadi longsor pada tebing dan tanggul sungai di saat musim penghujan akibat arus yang cukup deras yang mengakibatkan areal pertanian dan permukiman masyarakat terendam banjir.
- ❖ Permasalahan pembebasan tanah masyarakat (ganti rugi tanah) yang menghambat pelaksanaan pekerjaan galian saluran pembuang/ normalisasi sungai.

### **b. Bidang Perumahan dan Permukiman**

Penanganan bidang ini terutama pada penyediaan perumahan yang layak huni bagi keluarga miskin/dhuafa, dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi lingkungan.

### **c. Bidang Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan hidup semakin menuntut keseriusan penanganannya. Permasalahan dan tantangan berat bagi pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan sangat terasa karena tidak memadainya prasarana dan sarana serta sumber daya manusia pendukung baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga mengakibatkan target yang ingin dicapai menjadi tidak maksimal. Sumber daya manusia pengelola laboratorium lingkungan baik secara kuantitas dan kualitas juga masih sangat kurang.



Alat ukur kualitas lingkungan masih sangat kurang sehingga parameter yang terukur masih sangat sedikit.

Hal ini memerlukan penguatan laboratorium lingkungan mengingat hingga saat ini laboratorium lingkungan yang dimiliki belum menjadi laboratorium rujukan bagi evaluasi kualitas lingkungan.

#### **d. Bidang Kebersihan**

Permasalahan yang masih dihadapi hingga saat ini pada bidang kebersihan masih belum tersedianya TPA yang permanen, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, serta masih terbatasnya sarana angkut sampah untuk melayani 27 kecamatan, demikian pula dengan prasarana dan sarana pendukung kebersihan lainnya. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih bergabung dengan TPA Alue Ulim Kota Lhokseumawe jika dilihat dari bentang wilayah layanan kebersihan Kabupaten Aceh Utara maka dibutuhkan TPA pada lokasi yang dapat menjangkau wilayah layanan yang pendek. Sementara itu diharapkan realisasi redistribusi kebersihan dapat didistribusikan kembali untuk mendongkrak kinerja bidang kebersihan.

#### **e. Bidang Perhubungan dan Pariwisata**

Permasalahan pada bidang perhubungan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di bidang perhubungan darat, laut dan udara, terutama dengan rencana pembukaan hubungan luar negeri dan Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional I (PKN I) Lhokseumawe.

Dengan adanya peningkatan kegiatan di pelabuhan laut Krueng Geukuh dan bandar udara Malikussaleh, maka pada tahun 2011 bidang perhubungan memprioritaskan pada peningkatan sarana dan prasarana untuk pelabuhan laut dan bandar udara. Disamping itu juga dalam mempertahankan kondisi jalan tetap baik maka diperlukan alat penguji beban kendaraan dan diperlukan rambu-rambu serta pengaman jalan demi menciptakan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas.

Bidang pariwisata yang terus ditingkatkan terutama untuk menarik wisatawan dan untuk menjaga situs-situs sejarah serta mengembangkan lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara, maka pada tahun 2011 program pembangunan bidang pariwisata prioritas pada pengembangan destinasi pariwisata berupa pembangunan



monumen dan pengembangan objek wisata, sedangkan untuk mempromosikan potensi Kabupaten Aceh Utara ke pihak luar dilakukan dengan program pengembangan pemasaran pariwisata berupa mengikuti dan mengadakan pameran-pameran.

## **2. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan Budaya**

### **a. Bidang Pendidikan**

Akses layanan pendidikan dasar masih menjadi isu utama dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Salah satu kebutuhan yang acap menjadi keluhan masyarakat yang diajukan dalam musrenbang dalam bidang pendidikan adalah permasalahan jarak sekolah yang tersedia relatif berjauhan dengan beberapa desa dan kecamatan, terutama daerah yang baru mekar. Masyarakat masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perluasan wilayah permukiman. Di samping itu sampai dengan tahun 2009 ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah gampong dan daerah terpencil masih terbatas. Hal tersebut menambah keengganan masyarakat miskin untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan.

Terbatasnya akses keluarga miskin terhadap pendidikan formal selayaknya dapat diatasi dengan penyediaan pelayanan pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup. Namun demikian pendidikan non formal yang memiliki fleksibilitas waktu penyelenggaraan dan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat miskin baik karena aksesibilitasnya maupun karena kualitasnya yang masih terbatas. Oleh sebab itu akses, kualitas dan format pendidikan non formal perlu terus dikembangkan untuk dapat memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin.

### **b. Bidang Kesehatan**

Akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan masih menjadi isu dalam pembangunan bidang kesehatan. Masih minimnya jumlah pusat layanan kesehatan di tingkat gampong seperti poskesdes, polisndes menyebabkan masyarakat harus pergi ke puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berada di pusat kecamatan.



Disamping juga kualitas tenaga kesehatan yang masih perlu peningkatan kapasitas dan juga distribusi petugas kesehatan yang lebih merata sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Disparitas status kesehatan antar golongan masyarakat masih sangat tinggi, disparitas tersebut terlihat dari Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan cakupan imunisasi pada golongan miskin lebih rendah dibanding dengan golongan kaya.

Beban penyakit. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, diare, dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus dan kanker. Selain itu Kabupaten Aceh Utara juga menghadapi emerging diseases seperti demam berdarah dengue (DBD).

Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan mencapai 622 orang, anak kurang gizi 600 orang, gizi buruk mencapai 5.243 orang, serta terdapatnya beberapa kasus lumpuh layu DBP dan TB menjadi masalah lain beban penyakit yang diderita masyarakat.

Pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada masalah dan tantangan antara lain: disparitas status kesehatan dan gizi antar tingkat sosial ekonomi, antarkawasan, dan antara perkotaan dan perdesaan; akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil; jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan belum memadai terutama di daerah terpencil, dan perbatasan; penyakit infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya.



### **3. Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan**

Produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas relatif masih rendah.

#### **a. Bidang Pertanian dan peternakan**

Permasalahan yang dihadapi dalam sektor pertanian antara lain adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung pertanian seperti masih rendahnya kualitas jalan usaha tani, peralatan dan teknologi pertanian. Oleh karena itu salah satu prioritas pembangunan bidang pertanian adalah peningkatan jalan usaha tani, peningkatan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas produksi yang lebih baik.

Ketersediaan benih unggul/bersertifikat sangat kurang yang menyebabkan hasil produksi panen tidak memenuhi target. Masih luasnya lahan yang belum tergarap juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam bidang pertanian dimana kebutuhan benih dan bibit yang sangat terbatas hingga banyak lahan yang terlantar.

Selanjutnya pada tahun 2011 program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan juga menjadi isu strategis.

Untuk menjawab isu tersebut, pemerintah akan melakukan program peningkatan ketahanan pangan melalui kegiatan intensifikasi tanaman padi, pemberdayaan balai benih, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan pengadaan sarana dan sarana teknologi tepat guna.

Permasalahan pada sektor peternakan antara lain adalah belum optimalnya sarana dan prasarana peternakan yang berdampak pada rendahnya produktivitas hasil yang dicapai, adanya wabah penyakit menular dan kurangnya mutu genetik ternak masyarakat, belum adanya akses pemasaran hasil ternak yang terpadu, juga masih rendahnya SDM dan kurangnya tenaga inseminator serta daerah layanan yang sangat luas tersebar di 27 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara .

Sedangkan pemberdayaan bidang peternakan pada tahun 2011 akan di upayakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit melalui kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular. Dalam rangka meningkatkan populasi hewan ternak akan dikembangkan kegiatan inseminasi buatan dan reproduksi.

#### **b. Bidang Perkebunan dan Kehutanan**

Isu strategis bidang perkebunan antara lain adalah peningkatan mutu benih dan bibit melalui rehabilitasi kebun rakyat (peremajaan kebun) dengan sistem intensifikasi dan ekstensifikasi, rehabilitasi lahan kritis, hutan *mangrove* dan perlindungan sumber daya



hutan. Untuk mengatasi isu-isu tersebut pemerintah akan melaksanakan program Rehabilitasi Lahan Kritis (RLK) melalui pembangunan dan pengayaan hutan rakyat dengan sumber dana DAK. Penanaman hutan mangrove juga sangat penting dilakukan dengan cara penghijauan kembali lahan-lahan mangrove. Demikian juga untuk melestarikan hutan akan dilakukan kegiatan pengamanan hutan dengan cara penyuluhan dan patroli hutan untuk menjaga hutan dari penebangan liar (*illegal logging*) agar hutan tetap lestari.

### **c. Bidang Kelautan dan Perikanan**

Rendahnya tingkat penguasaan teknologi perikanan dan kelautan juga salah satu hambatan yang dialami oleh bidang perikanan dimana hasil tangkapan nelayan yang tersisa terbuang percuma atau terkadang hanya diolah secara sederhana yang nilai ekonominya rendah di pasaran, hingga pada terbatasnya akses permodalan yang berdampak pada tidak sehatnya siklus keuangan dan pendapatan nelayan.

## **4. Peningkatan Investasi, Industri, Perdagangan dan Koperasi**

Permasalahan bidang penanaman modal diantaranya adalah belum jelasnya regulasi dan jaminan kebijakan investasi di daerah, terutama dalam pelayanan perijinan dan pemberian keringanan pajak, kepastian hukum dalam melaksanakan usaha, perbaikan prasarana transportasi darat, laut dan udara serta prasarana telekomunikasi, listrik dan air, masih kurangnya minat usahawan Aceh Utara bergerak dalam bidang investasi, pertanian, industri, pariwisata dan pertambangan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan yang berarti pada tahun 2008, dukungan investasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu diperkokoh. Tahun 2010 rencana investasi terutama yang berasal dari dalam negeri telah mulai dijangkau tetapi minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Aceh Utara relatif masih dalam fase menunggu. Demikian juga industri pengolahan masih tumbuh di bawah potensinya.

Upaya untuk meningkatkan investasi, mendorong industri pengolahan nonmigas, meningkatkan penerimaan ekspor akan ditingkatkan secara sungguh-sungguh. Tantangan ini semakin besar dengan kemungkinan melambatnya perekonomian nasional dan meningkatnya persaingan antar daerah baik dalam menarik investasi maupun mempertahankan pangsa pasarnya. Perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya



dukung ekspor akan ditangani dengan mengurangi hambatan perijinan, meningkatkan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah.

Permasalahan di bidang Usaha Menengah Kecil Dan Mikro yaitu **rendahnya produktivitas**. Produktivitas per unit usaha tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, yaitu produktivitas usaha mikro dan kecil masih rendah. Kinerja seperti itu berkaitan dengan: (a). rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan (b). rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku dan antargolongan pendapatan, termasuk penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing.

Perkembangan jumlah UMKM yang meningkat dari segi kuantitas belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai khususnya skala usaha mikro di Kabupaten Aceh Utara.

**Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif.** Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Disamping persyaratan pinjamannya juga tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar masih memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi.

Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.

**Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.** Sampai dengan pertengahan tahun 2007, jumlah koperasi mencapai 381 unit, dengan jumlah anggota sebanyak 51.451 orang.

Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi dikarenakan pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan



(struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (*best practices*) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di Aceh utara, hal ini dikarenakan oleh **Pertama**, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya kebutuhan/kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya, sehingga kehilangan jati dirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya / mandiri. **Kedua**, banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi moderen sebagaimana layaknya sebuah badan usaha. **Ketiga**, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan serta prinsip-prinsip koperasi. Akibat langsung yang dapat dirasakan meliputi: (i). kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya; dan (ii). citra koperasi di mata masyarakat kurang baik. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi.

Pada sektor perindustrian permasalahan yang dihadapi yakni banyaknya industri kecil menengah yang pengelolaannya masih sangat tradisional (sistem kekeluargaan) dan struktur organisasinya tidak jelas, umumnya tingkat pendidikan para pengelola sangat rendah. Tidak tersedianya kemampuan teknologi yang cukup, kurangnya frekwensi pelatihan teknologi tepat guna yang diberikan selama ini bagi pengrajin industri kecil menengah sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih rendah, tidak adanya hubungan kerjasama antara industri kecil menengah dengan industri besar yang saling membutuhkan, rendahnya peranan industri-industri besar dalam membina industri kecil menengah serta rendahnya kualitas SDM, lemahnya disiplin, etos kerja masih rendah dan lemahnya daya inovasi dan kreativitas KUKM dan terbatasnya modal, bahan baku, teknologi dan informasi.

Sektor perdagangan permasalahan yang dihadapi adalah prosedur pada perizinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan. Permasalahan lainnya berupa lemahnya kelembagaan perdagangan yaitu lembaga perlindungan konsumen, kemetrolagian dan kelembagaan persaingan usaha. Disamping itu juga prasarana dan sarana penunjang perdagangan masih rendah.



## **5. Pengembangan Syi'ar Islam**

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diimplementasikan melalui penegakan syariat Islam sejak tahun 2002. Dalam realitanya bila kita sedikit jujur implementasinya masih pada tataran wacana, mengingat pelaksanaan syariat Islam sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba, penjudian sering muncul kepermukaan, hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa alasan antara lain dikarenakan oleh belum konsistensinya kebijakan dengan implementasi sehingga penegakan syariat masih pada slogan, disamping kapasitas aparat penegakan syariat belum juga memadai baik dari kualitas maupun dari kuantitas.

### **4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

#### **A. Urusan Wajib**

##### **a. Pendidikan**

- Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)
- Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM)
- Penurunan Angka Putus Sekolah
- Peningkatan angka kelulusan murid
- Peningkatan guru berkualitas;
- Peningkatan bantuan beasiswa bagi murid kurang mampu dan berprestasi;
- Penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana belajar

##### **b. Kesehatan**

- Pelayanan kesehatan ibu dan bayi
- Pelayanan kesehatan lingkungan
- Pelayanan gizi obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif;
- Pelayanan pengobatan/perawatan
- Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa dan gizi buruk;
- Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;



**c. Pekerjaan Umum**

- Peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan ;
- Peningkatan tata guna air untuk usaha tani melalui penanganan jaringan irigasi;
- Pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- Memperkecil tingkat bahaya banjir pada kawasan rawan banjir;
- Peningkatan kapasitas P3A dalam pengelolaan irigasi.

**d. Perumahan**

- Peningkatan penataan bangunan;
- Pemenuhan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi;
- Peningkatan pelayanan pencegahan bahaya kebakaran.

**e. Perencanaan Pembangunan**

- Peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
- Peningkatan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi pembangunan;
- Peningkatan koordinasi antar *stakeholder*.

**f. Perhubungan**

- Peningkatan pengadaan fasilitas lalu lintas jalan provinsi dan Kabupaten;
- Penyempurnaan perangkat lunak bidang perhubungan;
- Peningkatan Kesadaran berlalu lintas masyarakat penggunaan jalan.

**g. Lingkungan Hidup**

- Peningkatan pendeteksian pencemaran lingkungan
- Pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup
- Pengelolaan ruang terbuka hijau.

**h. Kependudukan dan Catatan Sipil**

- Peningkatan data Kependudukan yang tercatat;
- Penertiban akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Perkawinan.



**i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif;
- Meningkatkan kesadaran mengenai bahaya kekerasan terhadap anak dan perempuan.

**j. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB;
- Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas.

**k. Sosial**

- Peningkatan pelayanan sosial terhadap anak yatim panti asuhan;
- Peningkatan penanganan dan rehabilitasi anak nakal dan korban Narkoba;
- Pelayanan sosial terhadap penghuni panti jompo;
- Peningkatan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan Karang Taruna, Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM);
- Pelayanan bagi pengurus Panti Asuhan.

**l. Ketenagakerjaan**

- Tersedianya jumlah tenaga kerja yang terlatih;
- Peningkatan pendayagunaan tenaga kerja
- Peningkatan perlindungan tenaga kerja.

**m. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

- Meningkatkan kemampuan akses modal dan kelembagaan koperasi;
- Peningkatan kapasitas manajemen pelaku usaha kecil dan menengah;
- Peningkatan kewirausahaan dan UKM yang lebih kompetitif.

**n. Kebudayaan**

- Peningkatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya
- Peningkatan kelompok kesenian Daerah.



**o. Kepemudaan dan Olah Raga**

- Peningkatan pembinaan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- Peningkatan prestasi olah raga siswa.

**p. Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri**

- Mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh Kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
- Meningkatkan etika dan moral budaya politik.

**q. Kehidupan Beragama**

- Pelayanan Syiar Islam dan Syariat Islam bagi masyarakat;
- Peningkatan manajemen dayah salafiah;
- Tersedianya informasi Syariat Islam.

**r. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.**

- Meningkatkan koordinasi antara DPRK, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
- Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Meningkatkan efektivitas birokrasi;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
- Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah;
- Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah;
- Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa;
- Peningkatan regulasi dalam rangka peningkatan PAD;
- Terpenuhinya kualifikasi formal dan terlaksananya pengembangan SDM aparatur;
- Tersusunnya sistem informasi kepegawaian daerah.



**s. Ketahanan Pangan**

- Peningkatan produksi padi, kedelai dan jagung;
- Peningkatan produksi daging dan telur.

**t. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pembangunan;
- Penguatan kelembagaan pemerintah gampong.

**u. Kearsipan**

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip;
- Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

**v. Perpustakaan**

- Meningkatkan motivasi, kemampuan membaca, dan menulis masyarakat
- Membuka akses layanan pustaka

**B. Urusan Pilihan**

**a. Pertanian**

- Pengendalian hama dan penyakit;
- Peningkatan intensitas penyuluhan pertanian;
- Peningkatan kesehatan ternak;
- Perbaikan mutu genetik ternak;
- Peningkatan produksi hortikultura;
- Intensitas pemanfaatan lahan terlantar;
- Intensitas pemanfaatan lahan potensial.

**b. Kehutanan dan perkebunan**

- Peningkatan produktifitas lahan terlantar dan produktif;
- Peningkatan produksi perkebunan (Sawit, Pinang dan kakao);
- Pengembangan usaha perkebunan rakyat.



#### **c. Kelautan dan Perikanan**

- Peningkatan produksi perikanan;
- Penanganan pasca panen;
- Pembinaan petani tambak;
- Perbaikan sarana dan prasarana perikanan.

#### **d. Perdagangan**

- Peningkatan perlindungan konsumen;
- Peningkatan informasi pasar komoditi pertanian dan industri kecil;
- Peningkatan akses pasar produk industri rakyat.

#### **e. Industri**

- Peningkatan hasil produksi rumah tangga, industri kecil dan menengah;
- Pembinaan industri kecil, rumah tangga dan kerajinan.

### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan tersebut meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun 2011 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SILPA) diperkirakan sebesar Rp. 129.005.369.472,- . yang akan digunakan untuk menutupi defisit Anggaran.



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2011, sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara.